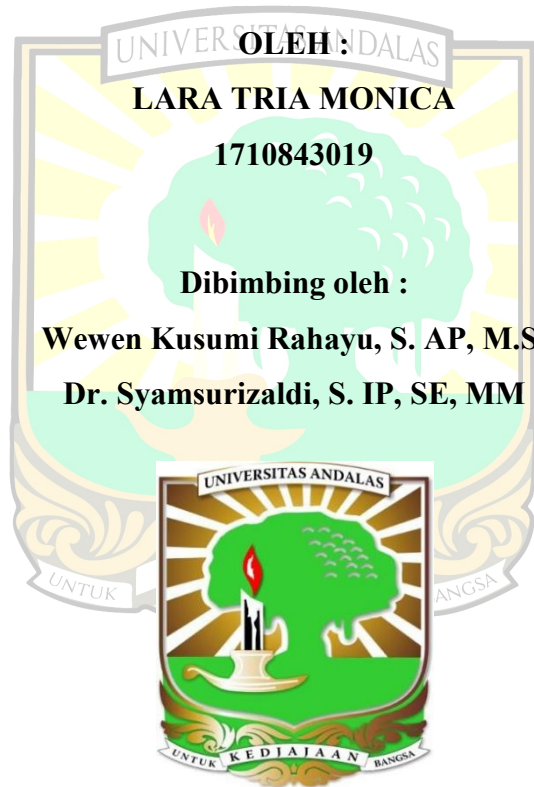


**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas



JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2021

ABSTRAK

Lara Tria Monica, 1710843019, Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2020 yang dibimbing oleh Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si dan Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM. Skripsi ini terdiri dari 176 halaman dengan referensi 10 buku teori, 3 buku metode, 3 skripsi, 2 jurnal, 1 undang-undang, 1 peraturan walikota, dan 6 website internet.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh yang berkomitmen untuk mengembangkan IKM Rendang dengan membentuk UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. UPTD P3R memiliki tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibidang Pelayanan dan Pengembangan Rendang, serta selaku pengelola Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh. Dalam proses implementasinya kebijakan ini menghadapi persoalan seperti pegawai UPTD P3R belum berpedoman penuh pada SOP dan belum sepenuhnya memiliki *sense of belonging* terhadap pekerjaan, keterbatasan gedung produksi di Sentra IKM Rendang, Alat operasional produksi-hingga pengemasan rendang yang masih minim, serta pasar yang ditargetkan belum didapatkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Dalam analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) yang terdiri dari 6 variabel utama dan data diolah menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2019 yang dianalisis dengan Teori Van Meter Van Horn belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal akibat kendala pada sumber daya manusia di bidang operator dan teknisi, kurangnya anggaran dan peralatan dari segi kuantitas, disposisi implementor yang terhambat akibat kurangnya sosialisasi kebijakan kepada seluruh implementor terkait, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kurang baik karena dampak kebijakan tidak dapat dirasakan langsung oleh publik meskipun peranan elit politik sudah terlihat. Sedangkan variabel lain seperti standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar-implementor, dan karakteristik agen pelaksana sudah memadai dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan, Industri

ABSTRACT

Lara Tria Monica, 1710843019, Implementation of Mayor Regulation Number 30 of 2019 concerning the position, organizational structure, duties, functions, and work procedures of regional technical implementing units at the Payakumbuh City Manpower and Industry Service, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2020 which was supervised by Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si and Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM. This thesis consists of 176 pages with references to 10 theory books, 3 method books, 3 theses, 2 journals, 1 law, 1 mayor regulation, and 6 internet websites.

This research is motivated by the policy of the Payakumbuh City Government which is committed to developing the Rendang IKM by forming the UPTD Rendang Service and Development Center (P3R) through Payakumbuh Mayor Regulation Number 30 of 2019 concerning the position, organizational structure, duties, functions, and work procedures of the UPTD in the Department. Payakumbuh Labor and Industry. UPTD P3R has the task of carrying out some of the technical operational activities and / or technical activities supporting the Payakumbuh Office of Manpower and Industry in the field of Rendang Service and Development, as well as managing the Rendang City IKM Center of Payakumbuh. In the process of implementing this policy, there are problems such as UPTD P3R employees who are not fully guided by SOPs and do not fully have a sense of belonging to work, limited production buildings at the Rendang IKM Center, production operational tools - as well as minimal rendang packaging, and the targeted market has not obtained. This research was conducted using a qualitative descriptive method. Data was collected through interviews with selected informants through purposive sampling technique, data collection was also carried out through observation and documentation. In the analysis of policy implementation using the theory of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn (1975) which consists of 6 main variables and the data is processed using data analysis techniques Miles and Huberman.

The results of this study indicate that the implementation of Mayor Regulation Number 30 of 2019 which is analyzed by the Van Meter Van Horn Theory has not been fully implemented due to constraints on human resources in the field of operators and technicians, lack of budget and equipment in terms of quantity, hampered implementor disposition as a result of lack of socialization of policies to all relevant implementers, as well as unfavorable economic, social, and political conditions because the impact of policies cannot be felt directly by the public even though the role of the political elite is already visible. Meanwhile, other variables such as policy standards and objectives, communication between implementers, and characteristics of implementing agents are adequate and support the success of policy implementation.

Keywords: Policy Implementation, Development, Industry